

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

A. Latar Belakang Penelitian

Globalisasi dewasa ini membuat semakin nyaman dan mudahnya kehidupan manusia. Manusia memiliki kemudahan untuk melakukan aktifitas dan kemudahan dalam mendapatkan segala sesuatu. Dengan kenyamanan serta kemudahan dalam hidup ini secara psikologis orang menjadi nyaman untuk tinggal di rumah dan membuat mereka nyaman dalam berkumpul bersama dengan keluarga hingga beranak cucu dengan cepat dan pesat. Hal ini berimplikasi pada membludaknya jumlah penduduk. Pertambahan penduduk perkotaan merupakan fenomena yang sedang dihadapi Indonesia, dimana pada tahun 2000 jumlah penduduk perkotaan mencapai 36% dari total jumlah penduduk Indonesia (Urdu, 1999: 1).

Bertambahnya jumlah penduduk di wilayah perkotaan yang cepat memberikan konsekuensi peningkatan permintaan penyediaan sarana dan prasarana kota termasuk kebutuhan di sektor perumahan dan pemukiman. Hal ini sesuai dengan salah satu amanah dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir maupun batin. Memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu indikator dari sejahtera lahir dan batin. Dimana hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ini dituangkan ke dalam Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945. Kesejahteraan dalam hal ini bukan hanya melalui kesejahteraan fisik, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan batin masyarakat Indonesia.

Dampak yang timbul dari globalisasi yaitu arus urbanisasi yang semakin pesat. Urbanisasi yang pesat tanpa diimbangi dengan penambahan fasilitas kota secara memadai memberikan implikasi terhadap perumahan dan pemukiman. Akibat tingginya laju urbanisasi menyebabkan berkembangnya kawasan pemukiman padat penduduk dan kumuh di wilayah perkotaan, hal ini yang akan

mengancam terhadap kesejahteraan warga negara. Dampaknya yaitu terjadi peningkatan kuantitas orang-orang yang datang dan menetap di kota, menjadikan kota semakin padat. Kondisi tersebut diperparah dengan sebagian besar dari penduduk kota adalah masyarakat berpenghasilan rendah (LPUI, 1995). Masyarakat penghuni tidak mempunyai kemampuan untuk membangun dan memelihara sarana dan prasarana lingkungan secara memadai.

Dewasa ini, masalah tata lingkungan tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran udara dan sungai-sungai yang diakibatkan sisa buangan industri, tetapi mencakup tata lingkungan yang semakin memburuk akibat benturan tekanan penduduk, pengembangan sumber alam dan energi, proses pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Zen, 1979: 46). Jadi, pemukiman kumuh juga merupakan salah satu masalah tata lingkungan. Kekumuhan suatu kawasan pemukiman akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan fisik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga bulan Oktober 2014 mencatat ada sekitar 38.431 *ha* kawasan kumuh yang tersebar di Indonesia (Priatna, 2014). Permukiman kumuh merupakan akumulasi dari ketidakmampuan masyarakat untuk memelihara rumah dan lingkungannya, serta ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola kawasan permukiman serta menyediakan sarana dan prasarana dasar.

Masalah lingkungan hidup sangatlah luas dan kompleks. Sebagai contoh, kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi, dampaknya pun dapat dirasakan di Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan manusia sebagai dampak adanya masalah lingkungan tidak hanya menjadi masalah individu atau sekelompok orang di suatu daerah, tetapi dapat meluas menjadi masalah suatu negara, bahkan dapat menjadi masalah dunia, setidaknya menjadi masalah regional. Penggunaan sumber daya alam yang tidak bijaksana dan tidak memperhitungkan faktor-faktor lingkungan akan menimbulkan masalah yang serius bagi manusia. Beberapa akibat yang dapat terjadi adalah erosi, banjir, pencemaran, dan punahnya berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Penderitaan yang disebabkan oleh masalah lingkungan tersebut sebenarnya merupakan dampak perilaku manusia (Sunarsih, 2002).

Munculnya kawasan kumuh di perkotaan yang diyakini akan sangat berpengaruh pada status kesehatan masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut. Penduduk di kawasan kumuh diyakini memiliki status kesehatan yang rendah dan berperilaku kesehatan yang masih jauh dari perilaku bersih dan sehat. Masalah kekurangan gizi dan kesehatan lingkungan yang tidak memenuhi syarat erat hubungannya dengan tata lingkungan yang telah semakin memburuk yang berhubungan dengan kepadatan penduduk dan dengan kemiskinan rakyat.

Jika terjadi kekumuhan suatu kawasan atau pemukiman, maka akan terjadi kebobrokan moral. Dampak yang muncul dari pemukiman kumuh yaitu biasanya peran-peran baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial atau masyarakat. Hal ini dikarenakan di dalam lingkungan yang padat dan kumuh mereka tinggal dalam kondisi kepadatan, ketidakteraturan, dan ketidaklayakan hunian sehingga terbatas bahkan tidak adanya saling menghargai diantara satu sama lain dalam anggota keluarga bahkan dalam lingkungan sosial atau masyarakat. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan lahan mereka untuk tinggal, dimana ruang tidur merupakan ruang pribadi, tetapi pada pemukiman kumuh, ruang tidur disatukan dengan sirkulasi menuju ruang lainnya. Bahkan ruang tidur yang menyatu dengan ruang dapur, tempat usaha, tempat cuci, dan ruang tamu sehingga dapat dikatakan bahwa dapur ditata multifungsi oleh masyarakat di lingkungan pemukiman kumuh. Dari kondisi tersebut akan sangat mempengaruhi terhadap sikap toleransi pada orang yang tinggal di lingkungan pemukiman kumuh.

Studi tentang hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, khususnya kajian mengenai hubungan lingkungan buatan dan perilaku manusia merupakan suatu kajian yang cukup menarik. Yang dalam penelitian ini memusatkan kajian pada lingkungan pemukiman kumuh terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan adanya pengaruh yang kuat baik positif ataupun negatif antara lingkungan fisik dan lingkungan buatan terhadap perilaku manusia (Clinard, 1973; Altman, 1975; Rapoport, 1982; Bell, 1984 dalam Sartomo, 1994).

Lebih lanjut Basir (2012) mengungkapkan ada berbagai dimensi dampak yang ditimbulkan terkait dengan pemukiman kumuh. Pertama dilihat dari dimensi fisik, kawasan kumuh mengindikasikan buruknya tata ruang yang mengganggu keindahan kota. Kedua dilihat dari dimensi sosial ekonomi, kawasan kumuh

menggambarkan kelompok penduduk kota yang miskin dan terbelakang. Dimana sebagian masyarakat kumuh adalah berpenghasilan rendah dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah yang dianggap sebagai sumber ketidakteraturan dan ketidakpatuhan terhadap norma-norma sosial. Ketiga dari dimensi moral, kawasan kumuh menjadi basis kriminalitas, kenakalan remaja dan perilaku menyimpang. Daerah kumuh sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena dapat merupakan sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang, seperti kejahatan, dan sumber penyakit sosial lainnya. Keempat dilihat dari dimensi kesehatan, kawasan kumuh dapat menjadi tempat penyebaran penyakit infeksi, terutama infeksi menular yang membahayakan penduduk kota. Selain dari keempat dimensi dampak di atas, dampak dari pemukiman kumuh dalam hal keruangan yaitu adanya penurunan kualitas lingkungan fisik dan sosial pemukiman yang berakibat semakin rendahnya mutu lingkungan sebagai tempat tinggal (Yunus, dalam Rindarjono, 2010).

Gamal Rindarjono (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Perkembangan Pemukiman Kumuh di Kota Semarang Tahun 1980-2006 mengungkap bahwa lingkungan permukiman kumuh yang ada di Semarang memperlihatkan kondisi kualitas lingkungan yang semakin menurun, secara umum hal ini dapat diamati berdasarkan hal sebagai berikut: (1) Fasilitas umum yang kondisinya dari tahun ke tahun semakin berkurang atau bahkan sudah tidak memadai lagi; (2) Sanitasi lingkungan yang semakin menurun, hal ini tercermin dengan tingginya wabah penyakit serta tingginya frekuensi wabah penyakit yang terjadi, umumnya adalah DB (demam berdarah), diare, dan penyakit kulit; (3) Sifat *extended family* (keluarga besar) pada sebagian besar pemukim permukiman kumuh mengakibatkan dampak pada pemanfaatan ruang yang sangat semrawut di dalam rumah, untuk menampung penambahan jumlah anggota keluarga maka dibuat penambahan-penambahan ruang serta bangunan yang asal jadi, akibatnya kondisi rumah secara fisik semakin terlihat acak-acakan.

Dampak yang telah disebutkan di atas kemudian diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanjung (2002) menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kumuh sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial yang ada di kawasan tersebut dan perilaku sosial ini akan berpengaruh terhadap tingkat

partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan di kawasan tersebut. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh mempunyai perilaku menyimpang, yaitu perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial, tradisi, dan kelaziman yang berlaku sebagaimana kehendak sebagian besar anggota masyarakat. Wujud perilaku menyimpang di pemukiman kumuh ini berupa perbuatan tidak disiplin lingkungan, seperti membuang sampah dan kotoran di sembarang tempat. Perilaku menyimpang selanjutnya yaitu perbuatan menghindari pajak, tidak memiliki KTP dan menghindar dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti gotong royong dan kegiatan sosial lainnya (Susanto dalam Novitasari, 2010).

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2010) menunjukkan bahwa kalangan remaja dan pengangguran yang tinggal di permukiman kumuh biasanya juga melakukan penyimpangan perilaku berupa mabuk-mabukan, minum obat terlarang, pelacuran, adu ayam, bercumbu di depan umum, memutar *blue film*, bergadang, dan berjoged di pinggir jalan dengan musik keras sampai pagi, mencorat-coret tembok atau bangunan fasilitas umum, dan lain-lain. Akibat lebih lanjut dari perilaku menyimpang tersebut bisa mengarah kepada tindakan kejahatan (kriminal) seperti pencurian, pemerkosaan, penipuan, penodongan, pembunuhan, pengrusakan fasilitas umum, perkelahian, melakukan pungutan liar, mencopet, dan perbuatan kekerasan lainnya.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat atau warga negara yang berwawasan lingkungan, secara konstitusional kedudukan, hak, dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan hidup yang sehat dan layak tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rumah dan permukiman merupakan tempat persemaian budaya dan pembinaan keluarga harus memenuhi kriteria sehat dan layak, hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses perkembangan dan pembentukan perilaku seseorang (Kokom Komalasari & Didin Saripudin, 2017). Dalam hal ini lingkungan sebagai faktor eksternal yang membentuk karakter seseorang. Durkheim mengatakan bahwa masyarakat harus memiliki nilai-nilai yang baik sebagai kontribusi warisan moral (Durkheim, 1973). Untuk itu, untuk terciptanya proses perkembangan dan pembentukan perilaku menuju karakter baik, diperlukan kondisi lingkungan yang memadai yang mendukung proses pembentukan perilaku seseorang tersebut. Dalam konteks ini, program-program pro-lingkungan perlu diisi oleh penguatan moralitas peduli lingkungan sebagai pencegahan kejahatan ekologi yang nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang (Budimansyah, 2015).

Untuk merealisasikan jaminan konstitusional tersebut, pemerintah memiliki beberapa kebijakan dan program terkait lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dari beberapa kebijakan tersebut menjadi indikator bahwa negara telah melakukan upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang memenuhi kriteria sehat dan layak.

Beberapa contoh program pemerintah dalam rangka memberikan jaminan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah melalui Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh 2015-2019 yang diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi antar sektor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan masyarakat untuk bersama-sama menangani permukiman kumuh secara tuntas dan berkelanjutan. Dalam menjalankan program tersebut tidak cukup jika hanya membenahi persoalan sarana dan prasarana semata, tetapi juga harus memperhatikan persoalan pembangunan manusia dan sosial (masyarakat) dengan cara meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki daya beli serta merubah perilaku dan nilai-

nilai yang ada di masyarakat merupakan syarat penting yang harus dilakukan untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Tantangan abad 21 kini bukan hanya pada sektor pembangunan ekonomi negara saja, tetapi juga pembangunan jati diri bangsa. Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran khas Indonesia yang memuat konten nilai-nilai Pancasila dengan salah satu outputnya adalah menjadikan generasi bangsa menjadi warga negara yang baik dengan tetap berpegang teguh pada jati diri bangsa yaitu Pancasila. Penerapan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di abad 21 bukan hanya diperlukan dalam konteks kelas dan diajarkan secara teoretik saja, tetapi juga diterapkan di masyarakat sebagai implementasi dari teori yang diperoleh.

Salah satu wahana penerapan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dapat diimplementasikan oleh seluruh masyarakat adalah berpartisipasi dalam kegiatan penyelamatan lingkungan hidup, atau dalam ilmu kewarganegaraan (*civics*) disebut juga kewarganegaraan ekologi (*ecological citizenship*). Sehingga diperlukan kesadaran setiap warga negara untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini didasari hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap pelestarian lingkungan yang muncul dari suatu pengakuan bahwa manusia dan alam adalah bagian dari ekosistem yang ada di bumi dimana manusia dan alam hidup saling bergantung satu sama lainnya.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki keselarasan yang alami dengan pendidikan lingkungan dan ilmu pengetahuan (He et al, 2017). Karakteristik warga negara dan warga dunia di abad ke-21 yaitu sebagai warga negara yang memiliki keahlian meliputi pendidikan, kemampuan politik, sosio-kultural, dan dimensi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional (Cogan dan Derricot, 1998: 13). Oleh karena itu, untuk mencapai kemampuan tersebut maka diperlukan pendidikan kepada warga negara untuk dapat menjadikan orang yang baik (*good person*) dan warga negara yang baik (*good citizen*). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai kajian keilmuan yang multifaset dan lintas bidang keilmuan dengan misi mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan beragam kompetensi warga

negara (*civic competencies*) yang di dalamnya meliputi *civic knowledge, civic skills, civic disposition, civic competence, civic confidence, dan civic commitment*. Sehingga Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) akan bertujuan pada pengembangan *smart and good citizenship* atau warga negara yang cerdas dan baik (Winataputra, 2012: 15).

Mariyani (2017) mengatakan ada beberapa faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan yaitu meliputi promosi pemerintah yang kurang dalam menggiatkan peran warga negara terhadap lingkungan, peran persekolahan yang belum optimal dalam pembelajaran berbasis lingkungan hingga kesadaran dan perilaku warga negara yang masih kurang dalam kewarganegaraan ekologis. Lebih lanjut Mariyani mengatakan bahwa warga negara yang baik tidak hanya memiliki pengetahuan dan partisipasi aktif saja tetapi juga memiliki watak kewarganegaraan yang peduli lingkungan. Oleh karena itu pentingnya upaya membentuk kewarganegaraan ekologis yang hakikatnya ialah tata cara etika dan moral warga negara terhadap lingkungannya secara bertanggung jawab mampu bijaksana dalam menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan.

Selain membentuk watak kewarganegaraan yang peduli lingkungan, dibutuhkan partisipasi warga negara untuk ikut serta dalam melestarikan lingkungan hidup. Partisipasi warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup harus didasari karena manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri. Kerusakan pada lingkungan hidup pada dasarnya juga merusak pada diri manusia itu sendiri (Syahri, 2016). Oleh karena itu partisipasi warga negara sangat dibutuhkan bukan hanya mengajak warga negara dalam proses pelaksanaan program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat tetapi juga warga negara ikut berpartisipasi dalam memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah, memecahkannya, membuat keputusan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi.

Berdasarkan observasi awal penulis (2018) telah terjadi perubahan kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan yang telah memunculkan gerakan *environmentalisme* pada masyarakat Kampung Bekelir. Kampung Bekelir yang terletak di RW. 01 Kelurahan Babakan, Kota Tangerang merupakan salah satu contoh wilayah yang berhasil menerapkan Program Nasional Penanganan

Permukiman Kumuh 2015-2019. Kampung Bekelir telah berhasil merubah wajah kampung kumuh menjadi kampung layak huni yang berbasis wisata dengan menekankan pada kearifan lokal setempat. Pada tahun 2016 kampung Bekelir mendapat gelar kampung kumuh sedang dengan tingkat hunian yang sangat padat. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2017 Ibnu Jandi adalah salah seorang penggagas yang berhasil mentransformasi wajah kampung bekelir sebagai kampung destinasi wisata yang asri dengan dipenuhi 1.210 gambar mural dan graffity yang memiliki estetika seni tematik yang menceritakan sejarah dan budaya Kota Tangerang.

Semua masyarakat yang tinggal di RW. 01 Kelurahan Babakan tersebut ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kampung wisata yang diberi nama Kampung Bekelir. Kepedulian dan kerja keras masyarakat RW. 01 yang memiliki keinginan yang kuat untuk mengubah stigma kampung kumuh menjadi kampung yang bersih dan sehat serta layak huni dan ramah lingkungan akhirnya terwujud. Kampung Bekelir telah menjelma sesuai dengan keinginan warganya. Kampung bekelir memadukan tiga konsep, yaitu kampung hijau, berwarna, mural & graffity. Konsep penataannya yang dimulai dari kampung kumuh berubah menjadi kampung sehat, hijau, yang dipenuhi ornamen seni untuk melestarikan kearifan lokal Kota Tangerang yang dikemas melalui mural dan graffity. Lewat karya seni tersebut Kampung Bekelir mencoba memperkenalkan penataan lingkungan melalui gambar yang mendidik. Banyak penghargaan yang diberikan kepada Kampung Bekelir antara lain juara PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat), FTKS, serta masuk dalam penilaian Adipura tingkat nasional, dan berhasil mendapatkan juara 2 pada ajang Anugrah Pesona Indonesia tahun 2018 oleh Kementerian Pariwisata RI. Kampung Bekelir juga kini dijadikan sebagai rujukan tata pengelola pembangunan kota, destinasi wisata kreatif buatan yang ramah lingkungan oleh berbagai daerah di Indonesia, dan yang tak kalah penting Kampung Bekelir telah menjadi kampung wisata mural satu-satunya yang ada di kota Tangerang yang telah mendunia.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah diuraikan di atas, diperlukan pendidikan pada warga negara untuk mengatur perilaku serta membangun kesadaran warga negara untuk ikut serta berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup. Maka dari itu peneliti mengambil judul “Membangun Kesadaran Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan melalui Pendidikan

Kewarganegaraan di Masyarakat (Studi Kasus di Kampung Bekelir, Kel. Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten).”

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka teridentifikasi beberapa masalah yang menyebabkan kesenjangan, untuk mendapatkan perhatian dan solusi. Pertama, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi warga negara akan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya masyarakat perkotaan. Kedua, masalah kewarganegaraan di era modernisasi telah didominasi dengan permasalahan ketersediaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Ketiga, masih banyaknya kampung kumuh di tengah-tengah kota yang ada dimana kesadaran masyarakat akan menjaga kelestarian lingkungan hidup masih sangat rendah, sehingga akan memicu berbagai macam permasalahan serta akan mempengaruhi pembentukan perilaku warga negara. Keempat, dampak dari pemukiman kumuh akan muncul berbagai macam penyakit dan masalah sosial sehingga akan mempengaruhi prestasi kerja, prestasi belajar, dan prestasi di bidang olahraga.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, agar penelitian lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan di Kampung Bekelir melalui Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat?
2. Bagaimana pelaksanaan program-program di Kampung Bekelir sebagai upaya membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan pada masyarakat?
3. Bagaimana hambatan dan solusi selama pelaksanaan program di Kampung Bekelir sebagai upaya membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan pada masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

Putri Utami Ramadhan, 2019

MEMBANGUN KESADARAN WARGA NEGARA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI MASYARAKAT (Studi Kasus di Kampung Bekelir Kota Tangerang Banten)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Tujuan umum

Penelitian ini secara umum dilakukan dengan tujuan untuk menggali, mengumpulkan informasi, mengkaji, mengorganisasikan informasi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagaimana yang telah dirumuskan, yakni untuk:

- 1) Memberikan kontribusi akademis pada pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan mengenai upaya membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan di masyarakat.
- 2) Melengkapi berbagai penelitian dalam bidang pembangunan kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan.
- 3) Mengkaji secara mendalam mengenai perspektif Pendidikan Kewarganegaraan terhadap isu kerusakan lingkungan dan peran warga negara terhadap kesadaran menjaga kelestarian lingkungan sebagai isu global.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mendeskripsikan konsep membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan di Kampung Bekelir.
- 2) Untuk mendeskripsikan program-program yang dilaksanakan di Kampung Bekelir yang dapat membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan pada masyarakat.
- 3) Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan solusi dalam melaksanakan program-program yang dapat membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan pada masyarakat Kampung Bekelir.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian tentang membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan melalui Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengayaan disiplin ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dan mendorong peneliti lainnya untuk mengadakan dan mengembangkan penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi tambahan referensi untuk mengkaji

dan merumuskan kajian mengenai pembangunan kesadaran warga negara terhadap pelestarian lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk memberi kontribusi terhadap ilmu kewarganegaraan khususnya mengenai membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan melalui Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat yang masih kurang terdapat referensinya dari penelitian-penelitian sebelumnya.
- b. Memberi kontribusi dalam membantu mempertahankan budaya bangsa Indonesia melalui Kampung Bekelir di bidang lingkungan sebagai upaya membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan khususnya pada lingkungan permukiman kumuh di masyarakat perkotaan.
- c. Memberi gambaran dan alternatif sudut pandang atas bagaimana membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Kampung Bekelir.

3. Manfaat Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan kontribusi mengenai konsep pendidikan dalam masyarakat untuk membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan khususnya pada masyarakat yang tinggal di kawasan pemukiman kumuh. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai pola bagi pemerintah untuk mendesain dan melahirkan gagasan dan ide-ide baru mengenai pemanfaatan hak-hak lingkungan dan juga tanggung jawab warga negara terhadap pelestarian lingkungan.

4. Manfaat Isu atau Aksi Sosial

Secara sosial penelitian ini diharapkan:

1. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pola membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan, serta tentang peran penting menjaga kelestarian lingkungan sebagai warga negara.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, bahwa lingkungan merupakan isu global, artinya sebagai warga negara Indonesia dan warga

dunia penting untuk memiliki perilaku dan kesadaran untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan yang baik.

3. Memotivasi masyarakat bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses perkembangan dan pembentukan perilaku seseorang sehingga dibutuhkan sikap peduli terhadap pelestarian lingkungan dimulai dari lingkungan tempat tinggal.
4. Memberikan contoh penataan lingkungan melalui gambar yang mendidik berbasis peran serta dan kemandirian masyarakat.

F. Struktur Organisasi Tesis

Struktur penulisan tesis ini merujuk pada Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia, yang terdiri dari 5 BAB, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang penjelasan mengenai landasan pemikiran serta pertimbangan-pertimbangan rasional yang disertai dengan fakta, data, konsep, maupun hasil-hasil penelitian yang mendukung serta memperkuat argumentasi mengenai alasan mengapa tema ini menarik untuk dikaji baik secara sosial maupun akademis. Bab ini terdiri dari enam sub-bab, yaitu latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Bab II Kajian Pustaka menjelaskan tentang berbagai konsep, generalisasi, teori, dan berbagai hasil temuan dari penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan akan digunakan sebagai rujukan untuk mengkonfirmasi, mendiskusikan, dan memperkuat temuan-temuan penelitian. Dalam hal tema penelitian ini, berbagai konsep, generalisasi, dan teori yang relevan adalah teori kewarganegaraan ekologi, teori lingkungan hidup, kajian pendidikan kewarganegaraan tentang kesadaran lingkungan sebagai *civic competence* dan hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan yang dikumpulkan dari berbagai buku dan jurnal.

BAB III Metode Penelitian menjelaskan mengenai pendekatan dan desain yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari desain penelitian, subyek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik validasi data.

BAB IV Temuan dan Pembahasan merupakan penjelasan rinci mengenai temuan dan pembahasan hasil penelitian yang disusun secara sistematis, terstruktur, detail, dan mendalam. Untuk melengkapi dan memberikan gambaran yang utuh mengenai temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka dalam Bab ini dijelaskan mengenai deskripsi lokasi penelitian, profil informan penelitian, temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari sub-sub pembahasan: (1) Konsep membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan melalui Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat Kampung Bekelir (2) Program-program yang dilaksanakan di Kampung Bekelir sebagai upaya membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan, (3) Hambatan dan Solusi dalam melaksanakan program sebagai upaya membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan di Kampung Bekelir. Hasil Pembahasan merupakan bagian yang mendiskusikan antara temuan dengan berbagai konsep, pendekatan, teori, dan berbagai literatur lainnya yang merupakan hasil penelitian terdahulu.

Selanjutnya, pada BAB V berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Simpulan merupakan penegasan atas jawaban permasalahan penelitian, sementara implikasi merupakan akibat yang ditimbulkan oleh hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis untuk lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan semua pemangku kepentingan yang berwenang dalam bidang pembangunan kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan, maupun untuk para akademisi yang konsen terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan dan pembangunan kesadaran lingkungan warga negara. Implikasi lain yang juga cukup penting dalam penelitian ini adalah terhadap kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai *core* keilmuan penulis.